

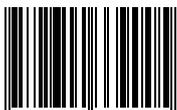


Buletin Parlementaria

Nomor 1084/IV/XII/2019 • Desember 2019



Wartawan Parlemen Diminta Sampaikan Kegiatan Kedewanan



9 772614 339005



4 Penguatan Regulasi
untuk Antisipasi
Perlambatan Ekonomi



6 TVRI Diminta
Perkuat Muatan
Konten Lokal

Wartawan Parlemen Diminta Sampaikan Kegiatan Kedewanan



Wakil Ketua BURT Novita Wijayanti saat membuka Forum Komunikasi dan Sosialisasi Program Kerja DPR RI.
Foto: Azka/JK

Koordinatoriat Wartawan Parlemen yang setiap harinya meliput kegiatan kedewanan diharapkan sebagai jembatan yang bisa membantu dalam menyampaikan pesan-pesan dari semua kebijakan serta kegiatan yang ada dan dihasilkan di DPR RI. Pesan tersebut disampaikan secara langsung oleh Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Novita Wijayanti saat membuka Forum Komunikasi dan Sosialisasi Program Kerja DPR RI.

“Saya berharap, wartawan khususnya wartawan parlemen sebagai jembatan yang bisa membantu dalam menyampaikan pesan-pesan dari semua kebijakan dan kegiatan yang ada dan dihasilkan di DPR. Pesan tersebut yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat atau publik supaya tidak salah dalam pemahaman di masyarakat,” ujar Novita dalam acara yang mengambil tema

Refleksi Akhir Tahun; Sinergi DPR RI dengan Wartawan Parlemen dalam Mensosialisasikan Kinerja DPR di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/11).

Novita berharap Koordinatoriat Wartawan Parlemen yang setiap harinya meliput kegiatan kedewanan juga turut menjaga kondusifitas dan persatuan bangsa. Hal ini mengingat kerap kali ditemukan media-media yang cenderung provokasi, sehingga menyulut emosi di masyarakat. Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Novita Wijayanti meminta Wartawan Parlemen untuk senantiasa proporsional dalam memberitakan kegiatan dewan, bahkan jika perlu menggunakan sudut pandang humanis dan positif.

“Sehingga, sebagai legislator berharap bisa bersama-sama sinergi dengan para wartawan parlemen untuk membuat suasana kondusif di Indonesia. Tanggung jawab para wartawan juga dalam menjaga stabilitas

dengan menghasilkan berita-berita yang baik supaya Indonesia kondusif,” tutur Novita.

Politisi Partai Gerindra ini juga menaruh harapan agar wartawan juga mampu memberitakan DPR RI dengan positif, karena menurutnya citra DPR RI yang baik adalah salah satu visi terwujudnya Parlemen Modern. Karena salah satu indikator Parlemen Modern adalah mendapatkan kepercayaan di masyarakat. “Kita *pengen*-nya membuat pencitraan yang baik, walaupun secara survei tidak demikian. Tapi kita tetap berharap dengan wartawan ini bisa bersinergi selalu (dengan DPR RI),” harapnya.

Usai memberikan sambutan, Novita juga secara simbolis melalui pemukulan gong sebagai pembuka kegiatan Forum Komunikasi dan Sosialisasi Program Kerja DPR RI. Turut serta mendampingi Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Damayanti dan Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Y.O.I Tahapari serta jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan Setjen dan BK DPR RI. Kegiatan ini turut dihadiri 112 wartawan parlemen yang tergabung dalam Koordinatoriat Wartawan Parlemen.

Novita berharap silaturahmi antara DPR RI dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen ini bisa terus dilakukan di tahun-tahun mendatang. Legislator dapil Jawa Tengah VIII ini juga membuka pintu seluas-luasnya terhadap wartawan yang ingin *sharing* informasi dan diskusi tentang situasi kebangsaan terkini. Acara diakhiri foto bersama Novita dengan pejabat lingkungan Setjen dan BK DPR RI dan seluruh wartawan yang tergabung dalam Koordinatoriat Wartawan Parlemen. ■ [hs,pun/sf](#)

Kekerabatan Indonesia-Prancis Kian Dipererat

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam Azis Syamsuddin didampingi Ketua BKSAP Fadli Zon menerima kunjungan perwakilan Parlemen Prancis dan Duta Besar Prancis, rombongan ini dipimpin Ketua Kelompok Persahabatan Prancis-Indonesia Hon. Mr. Raphael Gerard. Azis mengharapkan hubungan kedua negara semakin erat di bidang ekonomi dan budaya.

“Mudah-mudahan kunjungan kali ini mempererat hubungan, mempererat masalah ekonomi dan budaya. Dan *message* yang paling kita garis bawahi, Prancis mengajak Indonesia menjadi salah satu faktor dominan di antara *strategic geographic* di antara negara-negara di dunia,” papar Azis di Ruang Tamu Pimpinan DPR RI, Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12).

Dalam pertemuan tersebut, Parlemen Prancis mengundang perwakilan Indonesia hadir dalam perayaan 70 tahun hubungan antara Indonesia dan Prancis tahun depan.

Menurut Azis, kedua negara akan saling bekerja sama di berbagai bidang dengan mengedepankan konten lokal. “Prancis bersedia melakukan *partnership* kerjasama dalam hal bisnis transfer *knowledge* di bidang IT dengan mengedepankan konten lokal untuk menjadi bagian melakukan investasi ke depan,” jelas Azis.

Kedua belah pihak juga memberikan perhatian pada persoalan ekonomi dan kelapa sawit di Indonesia. Masalah kelestarian lingkungan dan pekerja buruh di perkebunan sawit menjadi topik pembahasan serius.

“Dia juga menyoroti masalah ekonomi khususnya dalam perkebunan kelapa sawit, kaitannya masalah lingkungan, kemudian juga masalah pekerja. Dan kami juga menyampaikan bahwa Indonesia secara pelan-pelan dan sudah menjadi komitmen bahwa masalah lingkungan akan menjadi prioritas,” papar Azis. ■ *eko/es*



Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menerima kunjungan kehormatan Dubes Perancis. Foto: Andri/UK



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Y.O.I Tahapari, S.H., M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)

Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO

Eka Hindra

SEKRETARIS REDAKSI

Guntur Dewanto, Hasri Mentari

ANGGOTA REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos., Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretno, S.I.Kom, Natasya Amanda P. S.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Riyan Hidayat, Nafisa Hanum Alaydrus, Larissa Amanda Indianti, Mohammad Rizki Nugraha.

FOTOGRAFER

Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman,
R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afidhillah,
Geraldii Opie.

ANALIS MEDIA

Ahyar Tibi, Deprisa Citra Akbari, Sunarya,
Fahmi Harfa, Safitri Restu Widyowati

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia,
Dipa Natallio, Fajar Suryanto

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Sartomo, S.S., M.Si (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

STAF PRODUKSI

Subadri, S.E, Barliansyah, Fathurahman

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito

PHOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Siti Nur Aidah S.A.P., M.AP, Sugiyanto, S.E., Yudi Kresna

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Yuliana Puspita

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO

DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL Cetak dan Distribusi (GRATIS)



Ketua DPR RI Puan Maharani berfoto bersama narasumber dan pengurus KADIN dalam acara Rapimnas KADIN di Bali. Foto: Eno/JK

Penguatan Regulasi untuk Antisipasi Perlambatan Ekonomi

Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan perlunya penguatan regulasi untuk menciptakan ekosistem berusaha yang kondusif. Menurutnya, iklim usaha yang kondusif diperlukan untuk mengantisipasi penurunan pertumbuhan ekonomi nasional akibat kondisi ekonomi dunia yang melambat.

“Substansinya menata sinergi kebijakan pemerintah pusat dan daerah, kemudahan perizinan, insentif bagi dunia usaha yang menghasilkan komoditas ekspor, insentif bagi dunia usaha yang inovatif, dan diikuti penataan aturan berinvestasi,” ungkap Puan di sela-sela Rapimnas KADIN 2019 di Bali, Jumat (29/11).

Puan yang tampil sebagai pembicara

utama dalam diskusi panel Rapimnas KADIN yang bertemakan ‘Menuju Ekonomi Maju, Berdaya saing dan Berkeadilan’ menekankan untuk dilakukan penguatan regulasi sebagai langkah agar meningkatkan potensi ekonomi Indonesia.

Menurut politisi PDI-Perjuangan itu, DPR RI akan membantu pemerintah dalam penguatan regulasi untuk mendorong laju perekonomian dengan segera membahas pembentukan RUU *Omnibus Law*. “DPR akan memastikan bahwa seluruh kepentingan *stakeholder* dapat terakomodir, baik itu Pemerintah, Pengusaha, Pekerja dan terutama kepentingan rakyat,” ungkap Puan.

Dalam paparannya, Puan

menekankan pentingnya pasar yang kondusif bagi produktifitas perekonomian nasional. Oleh karenanya, perlu adanya upaya dan kebijakan dalam memperluas dan memperdalam pasar untuk komoditas nasional. “Diperlukan adanya kebijakan afirmatif untuk melindungi produk dalam negeri agar dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” sambungnya.

Puan juga menyarankan agar proyek-proyek yang menggunakan APBN, APBD, dan BUMN, meningkatkan TKDN (tingkat kandungan dalam negeri) yang tinggi untuk menghemat devisa. Dengan demikian terjadi sinergi antara pusat dan daerah dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. ■ eno,hs/sf

Parlemen Indonesia-Dubes Kroasia Bahas Potensi Kerja Sama Ekonomi

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad menerima *courtesy call* (kunjungan kehormatan) delegasi Kedutaan Besar Kroasia yang dipimpin Duta Besar Kroasia untuk Indonesia Nebosja Koharovic. Dasco menuturkan, tujuan dari kunjungan kehormatan Dubes Kroasia ini untuk membahas potensi kerja sama Indonesia-Kroasia, khususnya di bidang perdagangan dan ekonomi.

“Beliau (Dubes Kroasia Nebosja Koharovic) berkunjung dalam rangka membicarakan masalah-masalah ekonomi, keuangan, serta informasi seputar kerja sama yang mungkin dapat dilakukan di bidang perdagangan dan ekonomi antara Indonesia dengan Kroasia,” ujar Dasco usai menerima delegasi Kroasia, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12).



Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima kunjungan kehormatan Dubes Kroasia. Foto: Jaka/JK

”

PERTEMUAN JUGA ADA SEDIKIT MEMBAHAS SOAL PRODUK-PRODUK PERTAHANAN, YANG PADA SAAT INI RUPANYA KROASIA PASCA PERANG ITU MENGEMBANGKAN DIRI ALAT PERSENJATAAN

Selain pembahasan bidang perdagangan dan ekonomi, politisi Partai Gerindra ini mengungkapkan, pertemuan dengan Dubes Kroasia tersebut juga membahas produk-produk pertahanan yang dimiliki Kroasia. Sebab, tutur Dasco, kondisi Kroasia pasca perang saat ini mengalami perkembangan yang pesat dalam sektor pembuatan alat-alat persenjataan yang berkualitas dunia.

“Pertemuan juga ada sedikit

membahas soal produk-produk pertahanan, yang pada saat ini rupanya Kroasia pasca perang itu mengembangkan diri alat persenjataan. Terutama, ada senjata pistol dan ada juga *helmet* spesial untuk perang yang didesain sedemikian rupa supaya tetap nyaman dan aman. Dan ada beberapa produk seperti kapal cepat serta tank kecil yang bisa menempuh medan yang sulit,” pungkas legislator dapil Banten III itu. ■ pun/sf

TVRI Diminta Perkuat Muatan Konten Lokal



Anggota Komisi I DPR RI Al Muzammil Yusuf. Foto: OjijK

Anggota Komisi I DPR RI Al Muzammil Yusuf mempertanyakan pengelolaan organisasi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI). Menurutnya, TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik bertujuan menyajikan program siaran yang senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

“Visinya misinya TVRI itu tidak bersaing di ranah yang menjadi kekuatan TV swasta berjangkaran. Visinya muncul di pendidikan dan hiburan yang menguatkan persatuan dan keberagaman guna meningkatkan martabat bangsa, tapi operasionalisasinya *enggak* ke situ,” katanya dalam RDP Komisi I DPR RI dengan Direksi LPP TVRI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (2/12).

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini mengkritisi, TVRI sebagai televisi “plat merah” yang justru membeli program siaran asing seperti Liga Inggris untuk konten penyiarnya. Menurut Muzammil, TVRI semestinya mengangkat nilai-nilai budaya dan unsur kebhinekaan dalam kearifan lokal.

“TVRI itu dibiayai oleh uang rakyat. Maka harus menyangkan tentang Indonesia dan kebhinekaan. Jadi, kalau TV swasta itu gambarannya kota, anak muda dan metropolis. Maka TVRI itu kalau saya bayangkan tentang rakyat, desa, laut, hutan, kekayaan alam lainnya. Seharusnya seperti itu, maka tv swasta tidak bersaing dengan anda (TVRI),” katanya.

Ia menambahkan, dibandingkan dengan membeli program asing yang kurang bermanfaat bagi kepentingan bangsa. Lebih baik TVRI terus meningkatkan kreativitas dan konsisten

”

MENGUSULKAN AGAR TVRI MENYEDIAKAN KANAL BAGI TELEVISI PARLEMEN SEBAGAI PUBLIC GOODS, SEHINGGA MASYARAKAT DAPAT MENGETAHUI KINERJA PARA WAKILNYA

dengan konten yang kental dengan budaya lokal. Apalagi TVRI didukung dengan SDM yang ada di setiap daerah dan dilengkapi dengan 397 pemancar yang bisa dimaksimalkan.

“Jangan tanggung-tanggung, setiap pegawai di daerah itu mencari kearifan lokal yang bisa diekspos ke pusat. Nah, bayangkan kalau TVRI konsisten konten yang kental dengan budaya lokal, bisa kalah itu tayangan Liga *Premier*,” terang legislator dapil Lampung I itu.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah (F-PD) mengusulkan agar TVRI menyediakan kanal bagi televisi parlemen sebagai *public goods*, sehingga masyarakat dapat mengetahui kinerja para wakilnya. Selain itu, melalui siaran tersebut masyarakat diharapkan dapat diberikan edukasi terkait kebijakan - kebijakan politik yang bersentuhan langsung dengan mereka.

“Mau ditonton atau tidak, ini adalah hak masyarakat untuk mengetahui apa parlemennya dan mereka juga bisa merasakan saat wakilnya memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi mereka,” tandas politisi milenial dari dapil Banten I ini. ■ ann/sf



Legislator Minta Ombudsman Proaktif Awasi Perilaku Penyelenggara Negara

Anggota Komisi II DPR RI, Kamrussamad meminta Ombudsman RI untuk proaktif mengawasi dan menyampaikan pendapat terkait perilaku penyelenggara negara.

Termasuk hal yang dilakukan oleh salah seorang staf khusus Presiden yang notabene berasal dari kaum milenial di salah satu akun media sosialnya, yang belakangan tengah ramai dibicarakan.

“Karena lembaga ini (Ombudsman-red) lebih pada fungsi pengawasan, tidak sampai fungsi vonis dan eksekusi, maka kami mendorong lembaga ini memperkuat kemitraan dengan media, dengan cara membentuk media center, yang secara regular bisa membangun kekuatan opini tentang hasil-hasil

pencapaian kinerja dari lembaga ini,” ujar Kamrussamad dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Ombudsman RI di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/12).

Dengan begitu, lanjut Kamrussamad, Ombudsman bisa lebih kuat dan lebih terjadi peningkatan informasi masyarakat akan kewenangan lembaga Negara ini. Ia mencontohkan, ketika salah seorang staf khusus presiden baru-baru ini dalam akun media sosialnya membuat status dengan

menggunakan frasa ‘Kubu Sebelah’.

“Disini, Ombudsman harus proaktif menyampaikan dan menanyakan pendapatnya. Jangan sampai, frasa ‘kubu sebelah’ yang ditulis di akun media sosial staf khusus Presiden tersebut nantinya malah mendistorsi kualitas pelayanan di lingkungan kepresidenan,” terangnya

Menurut Politisi Fraksi Partai Gerindra ini, mungkin karena staf khusus Presiden tersebut berasal dari anak milenial, maka ia menilai perlu *briefing*, *coaching*, atau perlu mentoring terhadap para staf khusus Presiden tersebut dari berbagai macam kehidupan sosial bernegara. ■ ayu/es

”

...KAMI MENDORONG LEMBAGA INI MEMPERKUAT KEMITRAAN DENGAN MEDIA, DENGAN CARA MEMBENTUK MEDIA CENTER, YANG SECARA REGULAR BISA MEMBANGUN KEKUATAN OPINI TENTANG HASIL-HASIL PENCAPAIAN KINERJA DARI LEMBAGA INI



Anggota Komisi II DPR RI Kamrussamad. Foto: Gerald/JK

Perlu Sinergi Antar Lembaga Hadapi Nataru

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie meminta Kementerian Perhubungan selaku koordinator penyelenggara angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) bersinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Basarnas, dan Korlantas Polri serta penyedia jasa angkutan transportasi nasional untuk mempersiapkan angkutan Nataru secara lebih baik.

Oleh karenanya, legislator dapil Kalimantan Barat itu mendesak Kemenhub untuk meningkatkan pengawasan terhadap badan usaha angkutan udara niaga atau maskapai di Indonesia dalam memperbaiki penanganan keterlambatan penerbangan, termasuk penyiapan armada cadangan dari setiap maskapai jika terjadi gangguan.

Hal itu ia ungkapkan saat memimpin Rapat Kerja Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum,

Perumahan Rakyat, Kepala BMKG, Kepala Basarnas, Kepala Korlantas Polri dan Penyedia Jasa Angkutan, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (2/12).

“Untuk menghindari gangguan pelayanan penerbangan, diharapkan agar setiap maskapai memiliki armada cadangan untuk mengantisipasi jika terjadi gangguan yang menyebabkan armada tidak dapat diterbangkan, hal ini menjamin ketepatan jadwal untuk keberangkatan pesawat. Pesawat cadangan tersebut yang secara khusus disiapkan untuk menggantikan pesawat yang bermasalah, bukan pesawat yang sedang *maintenance* atau *robbing sparepart*,” tegas Syarif.

Politisi Partai NasDem itu juga meminta kepada Kemenhub membuat terobosan terkait kebijakam tarif batas atas dan bawah untuk mengantisipasi adanya lonjakan harga tiket. “Saya meminta Kemenhub dan Badan Usaha Angkutan Udara untuk membuat terobosan kebijakan terkait tarif angkutan udara. Masyarakat selalu mengeluh terkait tingginya tiket saat peristiwa- peristiwa seperti ini,” tandasnya.

BMKG juga diminta untuk memperluas diseminasi informasi terkait perkembangan cuaca dan iklim dan memaksimalkan peringatan dini serta memastikan informasi tersebut sampai ke masyarakat, khususnya di daerah yang menjadi titik kumpul banyak orang saat liburan. “Tentu ini menjadi perhatian kepada BMKG agar sistem peringatan dini harus dimaksimalkan, agar tidak terjadi kejadian kecelakaan yang berulang,” pesan Syarif. ■ hs/sf

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarif Alkadrie.
Foto: Runi/JK



Produksi Pupuk BUMN Perlu Kebijakan Afirmatif



Anggota Komisi VI DPR RI Lamhot Sinaga. Foto: Azka/JK

Anggota Komisi VI DPR RI Lamhot Sinaga mendorong Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memberikan kebijakan afirmatif untuk harga gas dalam industri pupuk BUMN, sebab gas merupakan *raw material* yang digunakan industri pupuk dalam proses produksinya. Penggunaan gas sebagai *raw material* dalam industri pupuk seperti misal pada PT. Petrokimia Gresik dikatakannya hingga 70 persen.

Hal ini ia ungkapkan ketika mengikuti rapat kerja perdana antara Komisi VI DPR RI dengan

Menteri BUMN Erick Thohir beserta jajaran di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (2/12). Lamhot menyatakan apabila diberikan kebijakan afirmatif, maka menurutnya tidak akan terjadi kelangkaan pupuk seperti yang saat ini terjadi di Indonesia.

“Kalau 70 persen *raw material* gas dari industri pupuk diberikan harga-harga komersial, menurut saya Kementerian BUMN harus memikirkan *affirmative price* untuk gas mereka. Kalau tidak salah, mereka membeli gas itu di angka 7 dollar AS lebih. Kalau Kementerian BUMN atau

”

**APABILA DIBERIKAN
KEBIJAKAN
AFIRMATIF, MAKA
MENURUTNYA TIDAK
AKAN TERJADI
KELANGKAAN
PUKUP SEPERTI
YANG SAAT
INI TERJADI DI
INDONESIA**

Pemerintah mempunyai *affirmative price* terhadap industri pupuk kita, saya yakin tidak akan ada terjadi kelangkaan pupuk,” jelasnya.

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan apabila masalah seperti ini terus terjadi, maka akan menimbulkan efek domino di lapangan. Di satu sisi produk pupuk BUMN harus subsidi. Kemudian perusahaan BUMN mempunyai beban untuk menanggung pemenuhan kebutuhan pupuk negara, apabila produksi tak mencukupi maka petani tidak dapat menikmati.

“Sehingga mereka hanya surplus pada ketika tidak musim tanam. Begitu musim tanam mereka kelabakan, begitu mereka kelabakan, ya petani kita menjerit, petani kita menjerit dan kemudian pada akhirnya kita tidak akan pernah mencapai swasembada pangan. Jadi di hulu *enggak* beres, akhirnya di hilir berantakan semua,” imbuah politisi dapil Sumatera Utara II tersebut. ■ er/sf

Ditjen ETBKE Harus Berintegrasi Bangun Pembangkit Listrik

Anggota Komisi VII DPR RI, Subarna berharap Direktorat Jenderal (Ditjen) Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berintegrasi dan bekerjasama dengan Kementerian lain untuk membangun pembangkit listrik dari potensi alam yang ada di daerah-daerah.



KONDISI ALAMNYA TERDIRI DARI LEMBAH-LEMAH DAN MEMILIKI BANYAK BENDUNGAN KECIL. SELAIN DIGUNAKAN UNTUK PENGAIRAN SAWAH ATAU IRIGASI, SEJATINYA JUGA BERPOTENSI DIJADIKAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR

“Ketika berbicara Energi Baru dan Terbarukan (EBT) ada sebuah peluang besar dengan kondisi alam yang ada di dapil saya Jawa Barat XI meliputi Tasikmalaya dan Garut. Kondisi alamnya terdiri dari lembah-lembah dan memiliki banyak bendungan kecil. Selain digunakan untuk pengairan sawah atau irigasi, sejatinya juga berpotensi dijadikan pembangkit listrik tenaga air,” ujar Subarna saat Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan

Dirjen EBTKE, Sutijastoto di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (3/12).

Subarna mencontohkan Bendungan Leuwikeris di Tasikmalaya yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mampu mengairi hingga Cilacap, merupakan salah satu EBT yang berpotensi sebagai pembangkit listrik tenaga air.

“Tentu saja melalui kerjasama Kementerian PUPR dengan Kementerian ESDM, dalam hal ini Ditjen EBTKE. Selain itu juga, apakah dimungkinkan pembangunan energi baru terbarukan itu bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pengusaha-pengusaha kecil. Sehingga ke depan akan ada kontribusi investasi jangka panjang yang dilakukan Pemda setempat,” ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto yang memimpin RDP saat itu. Sugeng mengatakan bahwa selama ini Kementerian PUPR perlu

melakukan *visibility study* tentang bendungan yang hanya dimanfaatkan untuk pengairan. Perlu adanya integrasi antar kedua lembaga negara tersebut dalam memanfaatkan potensi EBT dari bendungan sebagai pembangkit listrik, tentu saja dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah agar tidak jalan sendiri-sendiri.

Baik Subarna maupun Sugeng, berharap ke depan Kementerian ESDM khususnya Ditjen EBTKE dapat berintegrasi atau bekerjasama dengan Kementerian lain untuk mengembangkan energi baru terbarukan seperti halnya ini pembangkit listrik. Bahkan kerja sama juga dapat dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat.

■ ayu/es

Anggota Komisi VII DPR RI Subarna. Foto: Geraldi/JK



Pemerintah Bertanggung Jawab Atas Layanan Kesehatan yang Layak



Anggota Komisi IX DPR Intan Fitriana Fauzi. Foto: Jaka/JK

Anggota Komisi IX DPR RI Intan Fitriana Fauzi mengatakan layanan kesehatan yang layak adalah tanggung jawab pemerintah. Hal tersebut sesuai Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 28 H ayat (3) yang menyebutkan bahwa "setiap orang berhak atas Jaminan Sosial".

Saat ini, pelaksanaan pelaksanaan layanan kesehatan yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Kesehatan banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Perbaikan tata kelola dan manajemen mutlak diperlukan. Intan menekankan pemerintah perlu memperbaiki data peserta BPJS Kesehatan khususnya Penerima

Bantuan Luran (PBI) agar manfaat yang diberikan tepat sasaran.

"BPJS bidang Kesehatan harus mampu meng-cover layanan kesehatan untuk seluruh masyarakat, tidak boleh ada satu rumah sakit pun yang menolak pasien BPJS Kesehatan," tegas Intan usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Sekolah Kajian Strategik Global Pusat Kajian Jaminan Sosial Kampus Universitas Indonesia (UI) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/12).

Terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang menuai protes, ia meminta pemerintah untuk harus mengkaji kembali kenaikan iuran khususnya kelas III mandiri. "Rp 42 ribu mungkin kelihatannya kecil. Tapi kalau

hitungannya dalam satu kartu keluarga (KK), misalnya satu KK ada 5 orang, nah itu sudah berapa? Ini perlu dikaji kembali, jangan memberatkan rakyat," ungkapnya.

Selain itu, Anggota Komisi IX DPR RI Nur Yasin turut mengomentari terkait subsidi energi yang lebih besar dari pada subsidi untuk kesehatan. "Belanja kesehatan itu harus di atas subsidi yang lain, di UUD 1945 juga jelas menyatakan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak boleh ada orang sakit ditelantarkan, pemerintah harus perhatikan ini," tegasnya.

Dalam kesempatan ini, pihak Sekolah Kajian Strategik Global Pusat Kajian Jaminan Sosial UI, Hasbullah Thabrang mengatakan dalam pemenuhan hak rakyat dan kewajiban rakyat, hendaknya semua pihak memperkuat argumen rasional ekonomis. "Semua pihak hindari jebakan pandangan jangka pendek yang dapat menurunkan kinerja JKN yang berdampak pada penurunan daya saing bangsa di masa depan," ungkapnya.

Menurutnya, BPJS bisa mengikuti kebijakan Pemprov DKI Jakarta, di mana Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) yang tidak bayar iuran otomatis menjadi peserta Penerima Bantuan Luran (PBI) Kelas III. "Biaya ini lebih kecil dari subsidi Solar, Premium dan LPG 3 kg yang di tahun 2019 ini mencapai Rp 160 triliun. Belanja kesehatan kita lebih kecil dari pada subsidi energi," tandasnya, seraya menegaskan agar keputusan politik yang memperkuat JKN jangka panjang dengan data dan fakta rasional, bukan sekedar menolak atau mendukung suatu keputusan. ■ rnm/es



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf berfoto bersama para Peserta Seminar tentang Perpustakaan. Foto: Rumi/JK

Pustakawan Harus Kreatif Budayakan Minat Baca

Perkembangan peralatan digital dan akses akan informasi dalam bentuk digital menimbulkan tantangan serta peluang bagi para pustakawan dalam meningkatkan literasi minat baca masyarakat Bangsa Indonesia. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menilai, di era digitalisasi saat ini, para pustakawan harus mampu mendorong minat baca masyarakat melalui pemanfaatan media sosial.

Menurut Dede, kreativitas dalam menyebarkan informasi melalui media sosial merupakan salah satu hal yang perlu dilakukan oleh pengelola perpustakaan. Hal itu ia ungkapkan usai menjadi narasumber dalam seminar yang bertema “Pemanfaatan dan Kita Pengguna Media Sosial Bagi Pengelola Perpustakaan” yang diselenggarakan Bidang Perpustakaan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (2/12). Seminar

ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar.

“Pustakawan harus keluar dari zona nyaman, harus ada terobosan serta inovasi yang dibuat dalam menyampaikan informasi yang dapat menarik minat baca masyarakat,” tutur politisi Fraksi Partai Demokrat itu seraya mengatakan peningkatkan literasi masyarakat sejalan dengan visi Nawacita Jilid II Presiden Joko Widodo, yaitu meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Maka, peningkatan literasi ini harus dikuatkan melalui kebijakan.

Seminar ini juga menghadirkan Editor Indonesiabaik.id, Edy Supangat. Edypank, sapaan akrabnya, menyampaikan bagaimana suatu informasi dikemas menarik agar isi pesannya sampai kepada khalayak. “Era digital saat ini, masyarakat lebih senang menerima informasi berbentuk visual, apalagi generasi milenial. Kita (lembaga negara) harus membuat konten yang menarik melalui pemanfaatan media sosial yang kita miliki,” ungkapnya.

Dijelaskan Edypank, gawai atau *gadget* adalah fenomena dasyat abad ini. Bahkan, bisa dikatakan *gadget* merupakan kebutuhan keempat setelah pangan, papan dan sandang. Berdasarkan riset yang Indonesiabaik.id, dalam satu hari ada sekitar 2,5 miliar pesan yang tersebar, ada 5 juta video yang ditonton, serta seseorang mengecek *gadget*-nya mencapai 200 kali dalam satu hari. Namun, “minat baca sangat rendah,” tandas Edypank.

Untuk itu, lanjut Edypank, cara menarik perlu dilakukan dalam penyebaran informasi melalui *visual content* perlu dibuat dalam format video, komik, infografis, *quotes*, *meme*, foto beserta caption menarik, atau hal yang menyentuh emosi masyarakat. Sebagai lembaga negara, menurut Edypank, kecepatan menyebar informasi adalah bonus yang utama harus dilakukan dalam informasi yang di-*publish*. “Kita kan sering mendapatkan data, teks. Kita harus sampaikan informasi yang benar,” pesannya. ■ rnm/sf

Jamkrindo dan Askrindo Perlu **Skema Khusus** Hadapi Perekonomian Global

Kondisi perekonomian global yang terus melambat, turut berdampak pada perekonomian lokal, sehingga sektor keuangan kurang menguntungkan. Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dan PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) perlu mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menginvestasikan aset dan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), mengingat banyaknya perusahaan asuransi yang saat ini mengalami kesulitan likuiditas.

“Askrindo dan Jamkrindo harus mengedepankan prinsip kehati-hatian. Kami berpesan pada mereka agar tetap pada *core business*-nya, jangan melakukan ekspansi besar-besaran yang terlalu melenceng, harus punya skema agar tetap ada prinsip kehati-hatian,” ungkap Anggota Komisi XI DPR RI Vera Febyanthy usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI dengan jajaran Direksi Jamkrindo dan Askrindo, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (3/11).

Tidak hanya itu, politisi Fraksi Partai Demokrat ini juga menyoroti skema subsidi KUR terhadap produk asuransinya. Data penerima penyaluran KUR, juga penting untuk dibuat secara per sektor dan per bidang guna mengetahui sejauh mana efektivitas penerima KUR, untuk mengantisipasi penerima subsidi dan asuransi pada pihak yang itu-itu saja.

“Penyaluran KUR kan ada di pihak bank, Pemerintah yang melakukan penjaminan 10 persen, dari pihak bank ada 6 persen, dan 1 persennya dari asuransi. Ke depannya, kami perlu mendalami khususny penyaluran KUR di

bidang asuransi dan terhadap asuransi. Kita lihat di buku mereka ada penurunan deviden, penurunan setoran pajak, itu akan kita alami, karena tetap harus *prudent*,” tambah legislator dapi Jawa Barat VII itu.

Ke depannya, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR ini juga berharap Jamkrindo dan Askrindo lebih terbuka lagi terhadap program-program seperti Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Saat paparan, Vera menilai belum ada data secara jelas yang menyebutkan pada sektor apa program-program tersebut dijalankan. Tidak hanya itu, rencana transformasi digitalisasi yang akan dilakukan Jamkrindo dan Askrindo juga perlu untuk dilihat plus dan minusnya.

“Pada era industri 4.0 ini, pihak sektor keuangan juga harus hati-hati khususnya dalam penyaluran KUR, karena tidak semua petani, nelayan

dan usaha kecil di tingkat pedesaan itu mempunyai gadget yang mendukung. Jangan sampai mereka dipaksa mengikuti suatu transformasi tapi kesiapan infrastrukturnya belum siap. Pemerintah harus lakukan persiapan, baru industrinya bisa *match*, agar tidak terjadi pemborosan di awal tetapi malah stagnan untuk dipakai,” imbau Vera.

Dari sisi legislasi, diperlukan juga adanya perbaikan-perbaikan peraturan dimana saat ini *Omnibus Law* atau peraturan satu pintu masih dalam pembahasan hangat. “Kebetulan saat ini tren sektor keuangan belum menguntungkan, karena keinginan pemerintah untuk membuat *Omnibus Law* terkait pemberdayaan UMKM dan penciptaan lapangan kerja. Kita akan melakukan revisi UU OJK, Perbankan, serta aturan yang menjamin pemegang polis asuransi,” pungkasnya. ■ *alw/sf*



Anggota Komisi XI DPR RI Vera Febyanthy. Foto: Arief/JK

RUU Ketahanan Keluarga Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas

Tiga Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)

mengusulkan Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2020-2024.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ledia Hanifah saat rapat internal membahas usulan RUU Prolegnas Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020.

“Karenanya kami bersepakat untuk mengusulkan ini sebagai usulan anggota tiga orang yaitu, Pak Sodik Mudjahid, Ledia Hanifah dan Bu Netty Prasetyani,” papar Ledia di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12). Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, pembangunan berbasis keluarga menjadi persoalan yang esensial dalam pembangunan masyarakat.

Anggota Komisi X DPR RI ini menambahkan, pembangunan yang dimulai dari keluarga sangat diperlukan dalam mendukung pembangunan manusia. “Sehingga kemudian kami memandang pembangunan berbasis keluarga menjadi satu hal yang sangat penting. Kita tahu ada banyak persoalan-persoalan yang harusnya bisa diselesaikan dengan pendekatan keluarga,” jelas Ledia.

Ledia mengatakan, RUU Ketahanan Keluarga telah menjadi prioritas DPR RI

”

SEHINGGA KEMUDIAN KAMI MEMANDANG PEMBANGUNAN BERBASIS KELUARGA MENJADI SATU HAL YANG SANGAT PENTING. KITA TAHU ADA BANYAK PERSOALAN-PERSOALAN YANG HARUSNYA BISA DISELESAIKAN DENGAN PENDEKATAN KELUARGA

Periode 2014-2019 lalu, namun sampai akhir masa jabatan ternyata tak selesai dibahas. Oleh sebab itu diusulkan kembali menjadi Prolegnas Prioritas. “Kami juga telah menyiapkan naskah akademik serta draf RUU-nya sebagai inisiatif anggota,” ujar Ledia.

Ia menjabarkan, pembangunan keluarga di Indonesia belum dibahas secara mendalam dalam UU. “Kami bertiga menginisiasi Rancangan Undang-Undang ini karena memandang bahwa pembangunan keluarga di Indonesia belum dibahas secara mendalam, baru berhenti pada terminologi di Undang-Undang 52 tahun 2009 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, baru sampai terminologi ketentuan umum,” jelas Ledia. ■ eko/sf



Anggota Baleg DPR RI Ledia Hanifah. Foto: Arief/JK

Penyusunan Prolegnas 2020-2024 Mengacu Hasil Evaluasi Periode Sebelumnya

Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) membahas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas 2020. Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menjelaskan penyusunan Prolegnas 2020-2024 akan mengacu pada hasil evaluasi prolegnas periode lalu.

"Dalam penyusunan Prolegnas 2020-2024, kita juga harus perhatikan hasil evaluasi Prolegnas periode sebelumnya 2015-2019, di mana targetnya 189 UU. Namun demikian, yang dapat diselesaikan 90 RUU," paparnya di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12).

Supratman mengatakan tidak tercapainya target Prolegnas itu tidak boleh terulang di periode 2020-2024. Karena itulah, dia menargetkan RUU yang dibahas di periode ini akan lebih realistis. "Tentunya tidak boleh terulang kembali pada 2020-2024 menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, DPR RI, dan DPD RI dalam penyusunan Prolegnas. Target ditetapkan tidak terlalu banyak," ungkapnya.

Menurut Supratman, Baleg DPR RI telah menentukan target pengesahan RUU menjadi UU dalam lima tahun ke depan. Dia menjabarkan, setiap komisi ditargetkan mengesahkan dua RUU, Baleg DPR RI dua RUU, dan Panitia Khusus ada 3 RUU menjadi UU. "Dari gambaran tersebut dapat dikatakan dalam 5 tahun dapat diselesaikan



Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menerima dokumen pandangan pemerintah terkait usulan Prolegnas 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas 2020. Foto: Oji/JK

sebanyak 135 RUU, Maka target RUU kita paling banyak 150 RUU. Ini sudah tidak sebanyak periode lalu," kata Supratman.

Baleg DPR RI telah menerima 451 usulan Rancangan Undang-Undang (RUU). Ia mengatakan, 451 usulan RUU itu berasal dari sebelas komisi di DPR RI, kelompok masyarakat, dan fraksi-fraksi di DPR. Dari sekian banyak usulan tersebut akan dicari kesamaan prinsip sehingga tidak ada RUU yang tumpang tindih.

Supratman, mengatakan, dalam penyusunan Prolegnas 2020, ada beberapa hal dipertimbangkan yaitu RUU yang pada periode sebelumnya sudah masuk tahap pembicaraan tingkat satu terutama *carry over* periode sebelumnya. Kedua, menurut dia, RUU yang sudah siap naskah akademik dan drafnya, dan ketiga, RUU yang masuk kriteria dan memenuhi urgensi masuk Prolegnas 2020. ■ eko/es

Parlemen dan Pemerintah Jadi Ujung Tombak Diplomasi

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengatakan Parlemen merupakan salah satu unsur penting dalam menjalankan politik luar negeri (polugri) Indonesia, sehingga bisa dikategorikan ke dalam *first-track diplomacy*. Bersama Pemerintah, Parlemen merupakan ujung tombak diplomasi RI dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan nasional.

Hal tersebut diungkapkan Fadli dalam *Workshop* Peringatan ke-130 *Inter-Parliamentary Union* (IPU) dengan tema "Peran Aktif DPR RI di IPU: Menuju Kemajuan Demokrasi dan Kesejahteraan Global" di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12). Hadir dalam acara tersebut, Pimpinan dan Anggota BKSAP DPR RI, Wamenlu RI Mahendra Siregar, Ketua Program Studi Eropa UI Henny Saptatia, Peneliti CSIS Gilang Kembara, dan perwakilan mahasiswa

dari berbagai universitas.

"Hari ini kita (BKSAP) menyelenggarakan 130 tahun IPU dalam rangka untuk mengingatkan kita semua pentingnya diplomasi parlemen guna mendukung kepentingan nasional kita, karena hakekat politik luar negeri kita adalah kepentingan nasional," kata politisi Partai Gerindra itu.

Menurut Fadli, IPU atau Badan Parlemen Dunia, selama satu abad plus tiga dekade telah mempromosikan perdamaian global dan pembangunan rakyat dunia. Sejak di gagas pada 30 Juni 1889, IPU berkontribusi besar mendorong negara-negara dunia untuk mengedepankan kerja sama dan dialog daripada konfrontasi perang. Sehingga eksistensi Parlemen dalam mendukung polugri merupakan keniscayaan.

Ia menyampaikan, terkadang dalam menjalankan polugri, ada hal-hal yang tidak bisa dijangkau eksekutif, misalnya isu sensitif seperti Rohingnya. Adanya

prinsip *non-inteference policy* di Forum ASEAN menyebabkan Pemerintah Indonesia tidak bisa menembus terlalu jauh. Lain halnya dengan Parlemen yang bisa lebih luwes menjalankan diplomasinya, contohnya melalui AIPA membahas isu Rohingnya dan menghasilkan resolusi.

"Begitu juga dengan isu Papua, kita punya hubungan yang baik dengan Parlemen Vanuatu. Tetapi karena ada perubahan anggota di Parlemen Vanuatu, mereka membuat konstitusi mendukung Papua Merdeka. Untuk merespon itu, kita berusaha juga membentuk sebuah forum dengan Parlemen Pasifik Selatan. Ada sekitar 14 anggota dan ketua parlemen negara pasifik selatan yang datang dan kita bicara dari hati ke hati yang akhirnya membuka wawasan mereka tentang Indonesia dan termasuk tentang Papua," terang Fadli.

Senada, Wakil Ketua BKSAP Charles Honoris menyampaikan IPU adalah organisasi multilateral parlemen-parlemen dunia yang bisa digunakan untuk mendukung kepentingan nasional maupun agenda global. Menurutnya, selama ini Parlemen Indonesia, dalam sidang-sidang IPU sudah berhasil mendorong berbagai macam resolusi. "Misalnya, isu kemanusiaan di Palestina, Rohingnya lalu isu - isu terkait perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan dan seterusnya tidak jarang muncul karena inisiatif dan dorongan dari Indonesia," kata Charles.

Wakil Menteri Luar Negeri RI Mahendra Siregar menyampaikan Parlemen dan Pemerintah bisa saling melengkapi dan membangun sinergi untuk memperjuangkan isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan nasional di tingkat internasional, regional maupun bilateral. ■ **ann/sf**



Ketua BKSAP DPR Fadli Zon menyerahkan cenderamata kepada narasumber dalam Workshop Peringatan IPU ke-130. Foto: Arief/JK

DPR Tingkatkan Kerja Sama 'People To People' dengan Ethiopia



Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menerima kunjungan Dubes Ethiopia. Foto: Jaka/JK

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani menerima kunjungan *Ethiopian Ambassador to Indonesia* Admasu Tsegaye, dalam rangka kunjungan kehormatan balasan dari Ethiopia, usai bulan September 2019 yang lalu delegasi BKSAP DPR RI mengunjungi negara yang terletak di benua Afrika Timur itu. Secara khusus, Mardani mengungkapkan, pada

pertemuan tersebut membahas lebih lanjut beberapa informal kesepakatan yang sebelumnya telah dibahas saat kunjungan delegasi BKSAP ke Ethiopia.

"Kami sangat gembira kedatangan Dubes Ethiopia Admasu Tsegaye bersama delegasi. Karena mengingatkan kepada BKSAP saat mengunjungi Ethiopia pada bulan September 2019 yang lalu. Kami diterima dengan sangat baik sampai tercapai kepada beberapa

informal kesepakatan. Mulai dari mengusahakan beasiswa pelajar Ethiopia ke Indonesia, kerja sama *people to people, civil society to civil society* sampai pembangunan masjid di salah satu Provinsi di Ethiopia," kata Mardani usai pertemuan di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12).

Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyampaikan, hubungan bilateral Indonesia-Ethiopia sudah terjalin sejak lama sejak jaman Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955. Melalui pondasi hubungan yang kuat Indonesia-Ethiopia itu, sambung Mardani, peluang Indonesia untuk mendapatkan benefit di Ethiopia sangat terbuka lebar. Mulai dari benefit ekonomi, benefit dukungan politik internasional sampai kepada beberapa kultur yang bisa dipadukan antara Indonesia dengan negara Ethiopia.

Selain itu, Mardani menyatakan, pada pertemuan itu Dubes Ethiopia mengungkapkan keinginan dari *Speaker* atau *Member of Parliament* Ethiopia untuk berkunjung ke Indonesia. Untuk itu, BKSAP akan mewujudkan keinginan Dubes Ethiopia itu dengan mengoptimalkan kunjungan Parlemen Ethiopia mendatang agar tercipta *awareness* dari negara-negara Afrika kepada Indonesia yang dalam beberapa tahun belakangan ini tidak terlalu ada perhatian lebih.

"Jadi, kunjungan Parlemen Ethiopia mendatang akan kita optimalkan. Saya minta waktu tepatnya kapan, sehingga kita bisa menyiapkan bukan hanya sekedar menerima. Tapi, lebih dari itu dengan *workshop* bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenuh) kita akan melayani studi banding. Misalnya, ke tempat pertanian, ke pembuatan waduk ataupun apa yang teman-teman Afrika inginkan. Intinya adalah kita memberi lebih dahulu, baru nanti kita diberi peluang untuk mendapatkan yang lebih," pungkas legislator dapil DKI Jakarta I itu. ■ pun/sf

Komisi VIII Dorong Pengelolaan Asrama Haji Secara Profesional

Komisi VIII DPR RI memberikan dukungan kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI dan para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Asrama Haji agar mampu mengelola asrama haji secara profesional. Ke depan, Komisi VIII DPR RI akan melakukan rapat dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Kemenag untuk membahas opsi pengembangan Asrama Haji secara profesional.

“Bagaimana kalau itu *grade*-nya kita naikan, dengan manajemen yang bagus, gedung yang bagus, kamar yang bagus, sehingga orang tidak minder menginap di Asrama Haji,” papar Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI dengan Dirjen

Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag di Ruang Komisi VIII DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12).

Politisi Fraksi PAN ini merasa miris melihat Asrama Haji yang dibangun dengan anggaran Rp 50 miliar tapi hanya dipakai pada saat musim Haji, setelah itu mangkrak tak terawat dengan baik. Bahkan biaya perawatan asrama sehari-hari harus mengharapkan anggaran dari Pemerintah. “Dari pada mangkrak Rp 50 miliar, malu lagi kita.

Kalau dibangun
sekelas



MENGUSULKAN AGAR PENGELOLAAN ASRAMA HAJI BISA SEKELAS HOTEL BERBINTANG DENGAN MENGEDEPANKAN PRINSIP SYARIAH

hotel akan menjadi hidup asrama haji, orang bisa menginap tapi syariah,” imbuhnya.

Yandri mengusulkan agar pengelolaan Asrama Haji bisa sekelas hotel berbintang dengan mengedepankan prinsip syariah. Dengan begitu ada banyak manfaat yang bisa didapat, pemeliharaan asrama haji terus berjalan, dan juga bisa menyerap tenaga kerja. Adapun berkenaan dengan payung hukum yang menaungi, legislator dapil Banten itu memastikan Komisi VIII DPR RI akan membahasnya lebih lanjut.

Dalam rapat tersebut, Komisi VIII DPR RI juga meminta Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag untuk segera membentuk UPT Asrama Haji di daerah bagi yang belum berstatus UPT sebagai upaya meningkatkan pelayanan bagi jemaah Haji. Selain itu Komisi VIII DPR RI juga mendesak Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan para Kepala UPT Asrama Haji menyediakan sarana dan prasarana di Asrama Haji untuk kaum disabilitas serta untuk mendukung peningkatan pelayanan terhadap jemaah haji.

■ eko/sf



Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto. Foto: OJJ/JK

Respon Tantangan Global, BKSAP Aktif Lakukan Diplomasi

Dalam rangka merespon berbagai peluang dan tantangan regional maupun global, serta demi memberikan dukungan penuh kepada diplomasi pemerintah yang bertujuan untuk menjaga kepentingan nasional, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI secara aktif dan konstruktif melakukan pelbagai kegiatan diplomasi, baik secara berkelompok atau individual, bilateral maupun multilateral.

Demikian hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera dalam kegiatan 'BKSAP Day' saat Kunjungan Kerja BKSAP DPR RI ke Universitas Lampung (Unila), Kota Bandar Lampung, Selasa (3/12). Mardani mengatakan, BKSAP berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia, baik secara berkelompok atau perorangan, bilateral maupun multilateral, melalui organisasi parlemen di level global ataupun internasional.

"Perjuangan mewujudkan kepentingan nasional Indonesia melalui panggung diplomasi di lingkup bilateral atau multilateral, regional maupun internasional di masa yang akan datang sesungguhnya menunggu kontribusi semua pihak, termasuk kalangan akademik dan mahasiswa," ucap Mardani.

Politisi Fraksi PKS itu mengatakan, diplomasi parlemen dalam praktiknya selalu berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah. Adapun nilai tambah diplomasi parlemen adalah tidak kaku atau fleksibel dibandingkan dengan diplomasi yang dilakukan eksekutif.

Di Indonesia, lanjutnya, diplomasi parlemen menjadi salah satu mandat DPR RI yang merupakan bentuk pelaksanaan *multi-track diplomacy*. "Diplomasi parlemen juga merupakan aplikasi dari diplomasi total, yang artinya adalah diplomasi yang melibatkan



Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera dalam acara BKSAP Day di Universitas Lampung. Foto: Dep/JK

semua komponen bangsa dalam suatu sinergi yang memandang substansi permasalahan secara integratif," tandasnya.

Ia menambahkan, diplomasi tersebut dilakukan antara pemerintah dengan pemerintah, swasta dengan swasta, *Non Government Organization* (NGO) dengan NGO, masyarakat dengan masyarakat dan komponen bangsa lainnya atau kombinasinya termasuk parlemen.

"Dengan diplomasi total, terdapat banyak langkah kreatif dan inovatif yang perlu dikembangkan oleh semua komponen bangsa. Alasan utama dari seruan diplomasi total ini didasarkan atas asumsi yang sederhana yaitu pemerintah terkadang menemui kesulitan ketika berinteraksi dengan beberapa isu di level regional dan global yang kian rumit, terutama karena karakter diplomasi pemerintah yang sangat formal dan seringkali kaku," tutur Mardani.

Melalui konsep diplomasi total, sambungannya, upaya diplomasi diharapkan akan berjalan lebih efektif dan fleksibel serta memberikan dampak yang lebih luas dan besar pada masyarakat internasional. "Diplomasi parlemen dapat dengan mudah melakukan dialog dengan pihak-pihak oposisi sebuah negara tertentu yang bertujuan menggali perspektif berbeda sehingga mendapatkan potret utuh terkait sebuah permasalahan," paparnya.

Ia juga menegaskan bahwa posisi parlemen terhadap sebuah isu regional dan global bisa saja berbeda dengan posisi pemerintah. "Dunia dewasa ini tidak lagi relevan disebut *global village*. Saat ini situasinya lebih tepat disebut *global home* yang lebih kecil lagi dari pada *global village*, yakni suatu masa yang di dalamnya penduduk dunia bisa saling berkomunikasi layaknya sebuah keluarga dalam satu rumah kecil," ungkapannya. ■ dep/es

ASN Harus Tiru Sifat Jujur Nabi Muhammad SAW

Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Badan Keahlian (BK) DPR RI Indra Iskandar menekankan agar setiap ASN meneladani sifat jujur Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut sesuai dalam rencana strategis (renstra) Setjen dan BK DPR RI yang biasa disebut nilai 'Rapi' yaitu religius, akuntabel, profesional, integritas.

"Dalam Renstra kita menetapkan kata religius di awal, itu dimaksud dalam setiap pekerjaan selalu menerapkan sifat religius," tutur Indra saat membuka acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan Santunan Anak Yatim yang mengangkat bertemakan "Mengimplementasikan Keteladanan Rasulullah dalam Membentuk Aparatur Sipil Negara yang Religius, Akuntabel, Profesional dan Integritas" di Masjid Baiturahman, kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 3/12.

Acara yang di selenggarakan Koperasi Pegawai Setjen dan BK DPR RI ini dimaksudkan untuk meneladani dan mengingat sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, terutama dalam mengimplementasikan nilai kejujuran. "Saya harap *outcome* dari acara ini adalah semua pegawai kita ini melakukan sesuatu pekerjaan sesuai dengan rambu-rambu atau pedoman yang ada di dalam setiap agama karena setiap agama mengajarkan kebaikan," tutur Indra.

Sementara itu, Wakil Ketua Panitia Acara Maulid Nabi Muhammad SAW, M. Chairudin menuturkan tujuan diselenggarakan acara tersebut adalah meningkatkan akhlak pegawai di lingkungan Sekjen dan BK DPR RI, karena Rasulullah diutus kedunia ini untuk memperbaiki akhlak manusia.

"Dengan adanya acara ini kami dari panitia berharap setiap pegawai bisa meningkatkan produktifitas di unit kerjanya masing-masing dan memiliki

nilai integritas dalam kejujuran dan bisa terhindar dari perilaku korupsi," tegas Chairudin.

Sementara itu, Ustaz Taufiqurrahman dalam tausyiahnya meminta para ASN untuk bisa menerapkan lima rukun Islam, yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji. Ia juga mengingatkan, hidup di dunia ini hanyalah sementara, dan setiap orang baik kaya, miskin, pejabat, hingga anggota dewan pun akan menjumpai kematian. Oleh sebab itu, sebagai manusia harus bisa taat menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah.

"Kita hanyalah manusia biasa dan akan menjumpai kematian, dari yang kaya sampai yang miskin hingga pejabat-pejabat pun akan menjumpai kematian, saya juga akan menjumpai kematian. Oleh sebab itu, apa yang Allah perintah harus kita jalankan dan larangannya harus kita jauhi," pesan Taufiqurrahman. ■ rh/es



Sekjen DPR RI Indra Iskandar menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Santunan Anak Yatim di Masjid Baiturahman DPR RI. Foto: Rumi/JK

FKSPK Sebagai Jembatan Informasi Antara DPR dan Wartawan



Deputi Persidangan Setjen dan BK DPR RI Damayanti.
Foto: Geraldi/JK

Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Keahlian (BK) DPR RI Damayanti menilai kegiatan Forum Komunikasi dan Sosialisasi Program Kerja (FKSPK) adalah jembatan antara DPR RI dan Koordinatoriat Wartawan Parlemen terkait program kerja DPR RI. Diharapkan dengan jembatani ini, semakin mempermudah Dewan untuk mempublikasikan seluruh kegiatannya. Sehingga masyarakat menjadi lebih mudah mengetahui rutinitas DPR RI.

”

JADI KAMI MENGHARAPKAN SEMUA DUKUNGAN (WARTAWAN) AGAR DPR SEMAKIN BISA DIKENAL DI MASYARAKAT SECARA AKTIF

“Kami mengharapkan bahwa kegiatan ini dapat mengidentifikasi semua kesulitan atau hambatan dalam mencari informasi-informasi DPR dan juga para wartawan kami harapkan dapat mewartakan kegiatan DPR dengan jujur secara proporsional,” ujarnya saat membuka FKSPK yang digelar di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/11). FKSPK dibuka langsung oleh Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Novita Wijayanti.

Maya, sapaan akrab Damayanti juga mengajak seluruh wartawan yang tergabung dalam Koordinatoriat Wartawan Parlemen untuk pro aktif dalam menciptakan citra parlemen yang positif guna mendapat kepercayaan masyarakat. Menurutnya negara demokrasi yang baik adalah negara yang parlemennya mendapatkan antusiasme dan *trust* di masyarakat.

“Jadi kami mengharapkan semua dukungan (wartawan) agar DPR semakin bisa dikenal di masyarakat

secara aktif. DPR juga bekerja terus untuk mewujudkan kemudahan akses masyarakat melalui dukungan teknologi serta sarana pendukung yang kita punya dari jajaran Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian,” tutur Maya.

Selain itu Maya juga mengucapkan terima kasih kepada Koordinatoriat Wartawan Parlemen yang selama ini sudah menjadi mitra pemberitaan terkait kegiatan kedewananan. Namun, ia tetap mendorong dan menaruh harapan agar Koordinatoriat Wartawan Parlemen dapat terus pro aktif dan menjadi ujung tombak pencitraan positif DPR RI.

“Pada kesempatan ini saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman wartawan yang tak kenal lelah mempublikasikan hal penting yang terjadi di DPR RI. Kita tahu beberapa bulan lalu ada sejumlah kegiatan penting di DPR seperti Pelantikan Presiden, Pelantikan Anggota Dewan serta rentetan aksi demo yang terjadi di DPR,” tutur Maya dalam forum yang mengambil tema “Refleksi Akhir Tahun; Sinergi DPR RI dengan Wartawan Parlemen dalam Mensosialisasikan Kinerja DPR” itu.

Sementara itu, Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen Romdhony Setiawan turut berpesan kepada jajarannya, untuk terus menjaga soliditas antar wartawan parlemen. Ia pun mengaku akan terus mengakomodir aspirasi dan masukan dari para jajaran anggotanya. Turut hadir Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Y.O.I Tahapari. ■ **hs/sf**

Anggaran BRG Perlu Diperjuangkan



PEMERINTAH HARUS MENINGKATKAN ANGGARAN BRG UNTUK MEMAKSIMALKAN PENANGANAN LAHAN GAMBUT YANG MENJADI PEMICU KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA. DENGAN TOTAL LAHAN GAMBUT SELUAS 2 JUTA HEKTAR DIBUTUHKAN PULUHAN TAHUN MENANGANI LAHAN GAMBUT



Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro . Foto: Jaka/JK

Badan Restorasi Gambut (BRG) sebagai lembaga yang menangani rehabilitasi lahan gambut di Indonesia yang memiliki lahan sekitar 2 juta hektar dinilai memiliki kesediaan anggaran yang sangat minim. Dilaporkan bahwa anggarannya setiap tahunnya hanya sebesar Rp 140 miliar. Sehingga, ke depan perlu kerja sama dengan banyak pihak agar lembaga ini mendapatkan tambahan anggaran agar kinerjanya maksimal.

Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro menilai anggaran BRG sebesar Rp 140 miliar sangat tidak cukup untuk menangani 2 juta hektar lahan gambut yang

ada di Indonesia. Pihaknya mendorong BRG mendapat anggaran tambahan di tahun berikutnya. Hal itu ia sampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Kepala BRG dan Ditjen Perhutani Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12).

“Pemerintah harus meningkatkan anggaran BRG untuk memaksimalkan penanganan lahan gambut yang menjadi pemicu kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Dengan total lahan gambut seluas

2 juta hektar dibutuhkan puluhan tahun menangani lahan gambut,” ujar Darori sembari menambahkan anggaran Rp 140 miliar hanya cukup untuk menangani 5 ribu hektar lahan saja. Sehingga jika anggarannya masih sedikit maka jangan langsung mempersalahkan kinerja BRG jika masih terjadi kebakaran.

Politisi Partai Gerindra itu menilai kinerja BRG di tengah kecilnya anggaran sudah cukup maksimal dalam melakukan penanganan lahan gambut yang tersebar di Sumatera, Kalimantan dan Papua. Meski ia terus mendorong agar dalam penanganan kebakaran ini, BRG dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah agar mendapatkan hasil yang lebih optimal. Ke depan, Komisi IV DPR RI akan memperjuangkan dukungan anggaran untuk BRG, dengan dukungan dari Pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan. ■ hs/sf

Rumah Sakit BaliMed Denpasar ‘*Representative*’ Bagi Anggota Dewan

Rumah Sakit BaliMed yang terletak di Jalan Mahendradatta No. 57 Denpasar, Bali representative untuk bisa menjadi rujukan bagi Anggota DPR RI dan keluarganya yang sakit. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Novita Wijayanti usai memimpin tim kunjungan kerja BURT ke Rumah Sakit BaliMed yang merupakan salah satu provider dari asuransi PT. Jasindo.

“Setelah kami melakukan pertemuan dengan Direktur Rumah Sakit dr. I Putu Oka Dharmawan dan jajarannya, serta melihat langsung sarana, prasarana dan pelayanan rumah sakit BaliMed, rumah sakit BaliMed *representative* untuk bisa menjadi rujukan,” papar Novita, di Denpasar, Bali, Rabu (4/12).

Novita menyampaikan tujuan BURT RI DPR berkunjung ke Rumah Sakit BaliMed adalah untuk melihat secara langsung sarana dan prasarana serta pelayanan rumah sakit tersebut. “*Alhamdulillah*, setelah melihat sarana dan prasarana rumah sakit ini, belum ada Anggota DPR RI dan keluarga baik yang merupakan daerah pemilihan Bali maupun anggota DPR RI yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Bali dirawat di sini. *Alhamdulillah* tidak ada yang sakit,” ujar politisi dapil Jawa Tengah VIII ini.

Tak hanya itu, Tim Kunker BURT juga mencari tahu apakah ada kendala-kendala, serta bagaimana proses pelayanan BPJS Kesehatan yang ada di rumah sakit ini. “Karena rumah sakit ini juga melayani pasien BPJS secara maksimal, tidak

membeda-bedakan apakah ini pasien BPJS Kesehatan atau bukan. Apakah ini pasien prioritas atau bukan. Rumah sakit ini memberikan pelayanannya maksimal,” jelasnya.

Bahkan, sambungnya, kalau ada keluarga menunggu pasien di ruang rawat inap lebih dari satu orang, disediakan makanan juga. Artinya, rumah sakit ini memberikan pelayanan yang maksimal kepada pasien dankeluarga pasien, supaya yang menunggu pasien tidak ikutan sakit justru nyaman agar bisa support keluarganya yang sakit bisa sembuh. “Rumah sakit ini, *representative* dan bisa direkomendasikan kepada 575 anggota dewan dan keluarganya untuk bisa berobat ke sini kalau ada yang

sakit,” tegasnya.

Dari hasil pantauan BURT DPR RI terkait pelayanan BPJS Kesehatan di RS BaliMed sudah maksimal. Oleh karena itu ia berharap, kalau ada tagihan, pemerintah segera membayarnya, supaya operasional dan kegiatan dari rumah sakit ini bisa berjalan lancar.

Selanjutnya, Novita menyampaikan rumah sakit ini sudah memiliki *data base* yang baik, bahkan pendaftaran bisa dilakukan melalui sistem *online*. Peralatan medis yang dimiliki pun sudah lengkap tersedia, dan kamar tipe *suite* juga tersedia di sini. “Kami berharap tidak ada yang sakit, dan harapan saya rumah sakit dapat meningkatkan pelayanannya agar menjadi rumah sakit yang lebih baik lagi,” tukasnya. ■ *sc/es*



Tim Kunjungan Kerja BURT DPR RI dipimpin Wakil Ketua Novita Wijayanti mengunjungi Rumah Sakit BaliMed di Bali. Foto: Suci/JK



SEGENAP PIMPINAN DAN ANGGOTA DPR RI



RACHMAT GOBEL
WAKIL KETUA DPR RI
BIDANG KORINBANG



AZIS SYAMSUDDIN
WAKIL KETUA DPR RI
BIDANG KORPOLKAM



PUAN MAHARANI
KETUA DPR RI



SUFMI DASCO AHMAD
WAKIL KETUA DPR RI
BIDANG KOREKKU



A. MUHAIMIN ISKANDAR
WAKIL KETUA DPR RI
BIDANG KORKESRA



SERTA KARYAWAN SETJEN & BADAN KEAHLIAN DPR RI

mengucapkan

SELAMAT NATAL 2019 & TAHUN BARU 2020